

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah

Fitriani

Unit Kerja: Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
E-mail: talitaaisyah2@gmail.com

Article History:

Received: 20 Agustus 2024
Revised: 05 September 2024
Accepted: 07 September 2024

Keywords: Poverty, Coping, Strategies

***Abstract:** This research aims to analyze the causes of poverty in Central Aceh Regency and its problems from various sectors using a SWOT analysis approach. Analysis of infrastructure needs for various sectors that encourage poverty reduction in Central Aceh Regency is also the aim of this research. Also, this research aims to design a policy direction for poverty reduction in Central Aceh Regency within a five year period. The use of analytical tools in this research will be used to see and determine the problem sectors that cause poverty in the Central Aceh Regency area. Apart from that, the analytical tools in this research will also provide an explanation of things that can and/or should be improved in the context of poverty alleviation in Central Aceh Regency. The next step in this research is to create a design for poverty reduction policy direction in Central Aceh Regency within a five year period. It is hoped that the results of this research can become an academic basis for poverty alleviation in Central Aceh Regency.*

PENDAHULUAN

Penanggulangan Kemiskinan menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, karena merupakan salah satu permasalahan pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan juga menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah terus berfluktuasi, dan sempat mengalami kenaikan akibat pandemi penyakit korona virus 2019 (COVID-19), persentase kemiskinan menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Aceh Tengah berada pada urutan ke-6 dengan persentase kemiskinan di tahun 2023 sebesar 14,38% sedangkan di urutan pertama adalah Kabupaten Simelue dengan persentase kemiskinan sebesar 17,92% dan di urutan paling terparah kemiskinannya adalah Kabupaten Aceh Singkil sebesar 19.15. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh tengah tahun 2023 adalah sebesar 31.680,00 dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023 sebesar 227.168 jiwa.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Dikatakan Aceh Tengah karena terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan ibukota adalah Takengon. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Bakosurtanal skala 1:50.000, posisi astronomis Kabupaten Aceh Tengah terletak pada 40 22' 14,42" – 40 42' 40,8" LU dan 96 15' 23,6" – 97 22' 10,76" BT. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya di sektor pertanian dan

perkebunan, kemudian sisanya di sektor peternakan, perikanan, perdagangan, dan pemerintahan. Kabupaten Aceh tengah memiliki 14 Kecamatan dan 20 kemukiman dengan jumlah kampung 295 kampung. Penduduk terpadat di Kabupaten Aceh Tengah berada di wilayah Kecamatan Bebesen.

Pada tingkat Nasional dalam RPJMN 2020-2024, Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020-2024 bahwa Tingkat kemiskinan sendiri diharapkan menurun menjadi 6,0–7,0% pada tahun 2024. Tingkat Provinsi, Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh dalam RPKA 2023-2026 pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 13,53%, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri target penurunan angka kemiskinan ditetapkan pada tahun 2026 menjadi 14%.

Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan terlihat jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dimana misi yang pertama berupa Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengangkat strategi Pengentasan Kemiskinan dengan sasaran 40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif dengan target penurunan tingkat kemiskinan antara 6 – 7 persen pada akhir tahun 2024. Agar dapat mencapai target ini, tentunya pemerintah membutuhkan data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya bisa menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Salah satu permasalahan kemiskinan Aceh Tengah adalah bagaimana menurunkan persentase penduduk miskin, dengan fokus pada penanggulangan kemiskinan pedesaan. Hal ini karena secara kewilayahan kemiskinan Aceh Tengah di dominasi oleh kemiskinan Pedesaan dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,26% atau sebanyak 32,720 Jiwa. Untuk itu, upaya percepatan penurunan kemiskinan di fokuskan pada penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Rata-rata kepemilikan lahan pertanian di kabupaten aceh tengah kurang dari 1 Ha. Hal ini menyebabkan produktivitas petani turun yang berdampak pada rendahnya pendapatan petani, sehingga mengalami kesulitan didalam memenuhi kebutuhan dasar minimumnya atau masih dibawa garis kemiskinan

Identifikasi masalah Kemiskinan Multidimensi Bidang Ketenagakerjaan. Terdapat 2 indikator Bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan analisis, yaitu : Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hasil identifikasi masalah Bidang Ketenagakerjaan terhadap 2 indikator tersebut menunjukkan hal sebagai berikut : kedua indikator tersebut capaiannya lebih baik dari capaian provinsi dan nasional. Meskipun capaian TPT sudah lebih baik, namun karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, maka dianggap perlu sebagai salah satu masalah.

Identifikasi masalah Kemiskinan Multidimensi Bidang Kesehatan. Terdapat 5 indikator Bidang Kesehatan yang dilakukan analisis, yaitu : Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan (Morbiditas), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Stunting. Hasil identifikasi masalah Bidang Kesehatan terhadap 5 indikator tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator masih di bawah provinsi dan nasional.

Identifikasi masalah Kemiskinan Multidimensi Bidang Pendidikan. Terdapat 8 indikator Bidang Pendidikan yang dilakukan analisis, yaitu: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI, Angka Partisipasi Murni SMP/MTS, Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Hasil identifikasi masalah Bidang Pendidikan terhadap 8 indikator tersebut menunjukkan jika secara posisi relatif dibandingkan dengan capaian Nasional, namun masih dibawah rata-rata provinsi.

Identifikasi masalah Kemiskinan Multidimensi Bidang Infrastruktur Dasar. Terdapat 4 indikator Bidang Infrastruktur Dasar yang dilakukan analisis, yaitu : Persentase Rumah Tangga

memiliki Akses Terhadap Sanitasi layak (%), Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%), Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau (%). Hasil identifikasi masalah Bidang infrastruktur Dasar terhadap 4 indikator tersebut menunjukkan jika secara posisi relatif dibandingkan dengan capaian provinsi dan Nasional, capaian keempat indicator masih dibawah target SPM terutama indikator Persentase Rumah layak huni. Jadi masalah dalam Bidang Infrastruktur Dasar adalah Persentase Rumah layak huni.

METODE PENELITIAN

Studi Literatur

Menyelidiki literatur terkait Kemiskinan, kebijakan daerah, dan studi kasus sejenis dari wilayah lain.

Survei dan Wawancara

Melakukan survei kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang melaksanakan Program dan kegiatan penuntasan kemiskinan untuk mendapatkan pandangan dan persepsi mereka terhadap Kebijakan pengentasa Kemiskinan. Melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pihak Perbankan, pengusaha UMKM, dan masyarakat, untuk mendapatkan sudut pandang yang holistik.

Analisis Data

Mengolah data survei dan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah

Pengertian dan Penyebab Kemiskinan

Jordan mengartikan orang miskin: *“the poor are people whose lack of resources damage their capacity to participate in a market environment”*. Artinya, orang miskin merupakan orang-orang yang karena kekurangan sumber daya pada dirinya mengakibatkan rusaknya kapasitas untuk berpartisipasi dalam lingkungan pasar/dunia usaha. Sedangkan Menurut Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki 5 (lima) dimensi, yaitu:

1. kemiskinan (*proper*),
2. ketidakberdayaan (*powerless*),
3. kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of mergency*),
4. ketergantungan (*dependence*), dan
5. keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Kedua teori di atas menunjukkan bahwa hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Lebih lanjut dinyatakan oleh Sajogyo dalam Suyanto telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut:

1. Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram per tahunnya;
2. Untuk daerah perdesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras 320 kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi beras 240 kilogram dan paling miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 180 kilogram per tahunnya. Adapun Mubyarto memberikan definisi kemiskinan adalah: ”Suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud

dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya keterampilan, produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Rendahnya pendapatan penduduk miskin menyebabkan rendahnya produktivitas dan meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat.” Berdasarkan beberapa definisi di atas, diketahui bahwa konsep kemiskinan mempunyai definisi yang variatif berdasarkan ragam paradigma, dimensi yang terukur berdasarkan aspek-aspek dan indikator yang menyertainya. Konsep kemiskinan secara utuh ”holistik” dapat diterjemahkan dengan memerhatikan beberapa keberfungsian dalam studi kemiskinan, antara lain:

- a. Kemiskinan setidaknya tidak diterjemahkan dari aspek karakteristik subjektivitas si miskin secara statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespons kemiskinannya, termasuk efektivitas jaringan sosial (lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan setempat) dalam menjalankan fungsi sosial;
- b. Kemiskinan hendaknya tidak didefinisikan sebagai ukuran indikator tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dengan jaringan sosial yang ada disekitarnya;
- c. Konsep kemampuan sosial dipandang lebih lengkap menerjemahkan teori kemiskinan dari pada konsep pendapatan dalam memotret sekaligus dinamika kemiskinan;
- d. Kemiskinan seyogianya dapat diterjemahkan dengan difokuskan pada pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dengan mencakup: kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian, memenuhi kebutuhan dasar, mengelola aset, menjalankan sumber-sumber, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan. Sedangkan indikator kunci untuk mengukur jaringan sosial dapat mencakup lembaga-lembaga sosial memperoleh sumberdaya (SDM dan finansial), menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelola aset menjangkau sumberdaya, berpartisipasi dalam program anti kemiskinan.

Penyebab Kemiskinan

Apabila dipandang dari sisi ekonomi, Shar dalam Kuncoro menyatakan penyebab kemiskinan dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang;
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia;
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Sharp dalam Kuncoro Sementara menurut Ginandjar, faktor - faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di antaranya; “rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian.” Ginandjar, Kartasasmita. Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat memengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu; pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis. Seperti yang dikemukakan oleh Nazara bahwa;
 - a. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidak mampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang bayaran di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP), namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan

seragam sekolah. Biaya yang harus di-keluarkan orang miskin untuk menyekolahkan anaknya juga harus termasuk biaya kehilangan dari pendapatan (opportunity cost) jika anak mereka bekerja. Ibid

- b. Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah perdesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Pada tahun 2004 terdapat 68,7 persen dari 36,10 juta orang miskin tinggal di daerah perdesaan dan 60 persen di antaranya memiliki kegiatan utama di sektor pertanian Sudaryanto, T. dan Rusastra, I.W. . Hal ini diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Suryahadi et.al, yang menemukan bahwa selama periode 1984 dan 2002, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, sektor pertanian merupakan penyebab utama kemiskinan. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 50 persen terhadap total kemiskinan di Indonesia dan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor jasa dan industri. Dengan demikian tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan di antara kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lainnya.
- c. Hubungan antara kemiskinan dengan gender, di Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal, dan lain-lainnya, penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki;
- d. Hubungan antara kemiskinan dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastruktur, sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang lebih baik;
- e. Lokasi geografis, ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Kedua, pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar provinsi di Indonesia. Selain itu dalam melihat kemiskinan ada dimensi lain, yaitu dimensi bukan pendapatan, seperti rendahnya pencapaian di bidang pendidikan dan penyediaan akses pada pelayanan dasar di berbagai daerah terutama di wilayah timur Indonesia, hal ini semakin mempertegas adanya kesenjangan berdasarkan lokasi geografis. Faktor-faktor tersebut ada keterkaitan satu sama lainnya yang membentuk lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah perdesaan, karena berpendidikan rendah, maka produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang akan diperoleh tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Akibatnya, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga-keluarga miskin pula pada generasi berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling memengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja tetapi multi faktor. Namun demikian secara garis besar faktor dominan yang memengaruhi timbulnya kemiskinan di antaranya; pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses di antaranya akses kesehatan, keuangan dan pelayanan publik lainnya.

Capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten

Aceh Tengah 2017- 2022, dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan
Dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Aceh Tengah, kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan diarahkan pada meningkatkan keterjangkauan warga miskin terhadap kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, air bersih dan sanitasi, rasa aman dan guncangan sosial serta bencana. Kemudian mendorong peningkatan pendapatan warga miskin dengan memberikan peluang kesempatan kerja, dan usaha.
2. Kebijakan untuk mengembangkan kemandirian
Upaya pengembangan kemandirian warga miskin dilakukan melalui berbagai kebijakan yang sifatnya memberdayakan Masyarakat, meningkatkan produktifitas dan pengetahuan serta mendorong sinergi dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Kebijakan mewujudkan masyarakat yang bermartabat.
Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dilakukan dengan berbagai langkah kebijakan dengan mendorong perilaku, budaya masyarakat menjunjung tinggi moral, religiusitas, memiliki akhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, prinsip kemasyarakatan dan menghormati kearifan lokal sehingga mempunyai jati diri dan mampu sejajar dan bersaing dengan daerah lain

Karakteristik kemiskinan secara makro Kabupaten Aceh Tengah

Persentase penduduk miskin atau *Head Count Index (HCI-P0)* adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan merupakan batasan minimum yang diperlukan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Individu dikategorikan miskin jika memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan dan sebaliknya. Dari garis kemiskinan juga dapat diketahui persentase penduduk miskin dan tidak miskin.

Pada tahun 2021 penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 15,26 persen, meningkat sebesar 0,8 persen dari tahun 2020 sebesar 15,08 persen. Sementara Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah terus di tahun 2021 sebesar Rp 505.933,- meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp 492.227,-. Artinya jika suatu rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga, maka rumah tangga tersebut memerlukan pendapatan sebesar Rp. 2.023.732,- agar tidak masuk dalam kategori miskin. Kabupaten Aceh Tengah berada pada peringkat 13 dari 23 kabupaten/ kota di Provinsi Aceh Tengah selama tahun 2020-2021. Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah

Persentase penduduk miskin (P0) sebesar 15,26 persen dapat diartikan sebanyak 15 dari 100 penduduk Kabupaten Aceh Tengah merupakan penduduk miskin. Dalam kurun waktu 10 tahun, angka P0 Kabupaten Aceh Tengah mengalami tiga kali peningkatan, yaitu di tahun 2015, 2017 dan 2021. Indikator P0 hanya menyajikan persentase penduduk miskin, namun tidak menginformasikan seberapa miskin penduduk miskin tersebut.

Indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan (P2) kemiskinan dapat memberikan insight seberapa dalam dan parahnya kejadian kemiskinan di suatu wilayah. Meskipun persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2021 meningkat, angka P1 dan P2 Kabupaten Aceh Tengah justru mengalami penurunan. Temuan ini mengindikasikan penambahan jumlah penduduk miskin disumbang oleh mereka yang berkategori rentan miskin, yang pengeluaran perkapitanya sedikit berada di bawah garis kemiskinan.

Karakteristik kemiskinan secara mikro Kabupaten Aceh Tengah

Secara nasional pemerintah telah melakukan pemeringkatan kesejahteraan dalam Basis Data Terpadu yang dilakukan dengan metode statistik yang disebut Proxy-Means Testing (PMT). Model PMT dibangun berdasarkan data makro yaitu SUSENAS yang secara statistik mencerminkan representasi karakteristik rumah tangga di setiap kabupaten/ kota di Indonesia dan mengakomodasi perbedaan karakteristik tersebut. Setiap kabupaten/kota memiliki model tersendiri, karena satu variabel tertentu bisa jadi adalah penentu kesejahteraan di satu daerah namun bukan pembeda kesejahteraan di daerah lain. Dengan demikian, untuk data yang diolah pada kajian ini adalah data yang berisikan nama dan alamat seluruh penduduk di Kabupaten Aceh Tengah yang diurutkan menurut peringkat kesejahteraan. Rumah tangga penduduk dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok per-sepuluhannya sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil, namun yang masuk dalam kajian ini adalah 4 desil terbawah, yaitu:

1. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
2. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah (miskin) yang berhak menerima bantuan pemerintah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah (hampir miskin) yang berhak menerima bantuan pemerintah berupa Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
4. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 30-40% terendah (rentan miskin) yang berhak menerima bantuan pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data yang bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil), serta dapat diakses pada website <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>. Kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 di Kabupaten Aceh Tengah yang memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah. Berdasarkan data P3KE ada sekitar 84.752 Jiwa atau 20.182 Kepala Keluarga (KK) penduduk yang masuk dalam kategori 40% terendah (desil 1 s/d 4) atau 38,76% dari seluruh jumlah penduduk Aceh Tengah.

Pilihan Kebijakan

Identifikasi Lingkungan Strategis dan Alternatif Strategi

Identifikasi lingkungan strategis internal dan eksternal untuk menganalisis keadaan saat ini didahului dengan pemahaman tentang arah kebijakan yang selanjutnya diikuti dengan analisis SWOT, yaitu menganalisis kekuatan (Strength/S), kelemahan (Weakness/W), peluang (Opportunity/O) dan ancaman (Threat/T) dari kebijakan strategi penanggulangan kemiskinan. memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun saat bersamaan dapat meminimumkan kelemahan dan ancaman. Dalam *policy paper* ini analisis SWOT diterapkan untuk mendapatkan strategi dalam penanggulangan kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah.

Sebelum melakukan analisis SWOT terkait kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di

Kabupaten Aceh Tengah, langkah awal yang perlu diambil adalah mengidentifikasi lingkungan strategis internal dan eksternal. Dalam konteks ini, lingkungan strategis internal mencakup program-program yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penanggulangan kemiskinan tersebut secara langsung. Sementara itu, lingkungan strategis eksternal merujuk pada faktor-faktor di luar kendali langsung pemerintah daerah, seperti peraturan provinsi dan nasional.

Pemahaman mendalam terhadap arah kebijakan yang diinginkan perlu diperoleh sebelum melanjutkan ke analisis SWOT, sehingga kebijakan tersebut dapat terintegrasikan dengan baik dalam konteks lingkungan strategis yang ada.

Setelah pemahaman tersebut terbentuk, analisis SWOT dapat diimplementasikan. Pada sisi kekuatan, fokus dapat diberikan pada aspek-aspek positif dari kebijakan. Di sisi lain, kelemahan perlu diidentifikasi dengan jelas. Peluang dari Strategi penanggulangan kemiskinan dapat mencakup berbagai program pemerintah dalam pemberian bantuan langsung tunai, pengembangan produk UMKM lokal, pesatnya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Aceh Tengah, produksi dan harga yang tinggi produk pertanian seperti kopi arabika/robusta, cabe dan tomat. Sementara itu, ancaman dapat bersumber dari tingginya angka pengangguran, harga sembako yang tinggi, pelayanan kesehatan yang buruk.

Dengan memahami elemen-elemen tersebut, strategi dapat dirumuskan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Arah kebijakan

Dalam *policy paper* ini, arah kebijakan yang diusung dalam penerapan strategi penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk mencapai pemberian layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, standar pendidikan yang tinggi untuk anak usia didik, konektivitas atau standar yang baik untuk sarana dan prasarana jalan. Pengambilan kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang cermat, karena tidak hanya memperhatikan kebutuhan dan aspirasi pemerintah daerah, tetapi juga kepentingan masyarakat banyak agar keluar dari garis kemiskinan. Melalui pendekatan ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai seperti:

1. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
5. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar

Analisis SWOT

1. Kekuatan (S)

Kekuatan Kabupaten Aceh Tengah bisa bersumber dari sektor Pertanian karena peningkatan permintaan pasar yang tinggi terhadap produk-produk pertanian, kehutanan, dan perikanan dari Kabupaten Aceh Tengah. Seperti produk kopi arabika, selain itu adanya peningkatan kesadaran akan kebutuhan produk lokal, permintaan ekspor, serta peningkatan sektor pariwisata yang berbasis alam juga ikut menjadi pendorong pertumbuhan sektor ini. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan, penting untuk terus mengembangkan sektor-sektor tersebut serta mendorong diversifikasi ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Komoditas Kabupaten Aceh Tengah yang telah dipasarkan keluar daerah/Negara adalah komoditas perkebunan yaitu kopi arabika, Sektor Perdagangan di Kabupaten Aceh Tengah memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk struktur perekonomian dan meningkatkan laju perekonomian. Selama 5 tahun terakhir, kategori perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang lebih dari 10 persen terhadap ekonomi Aceh Tengah.

Peningkatan wisatawan menjadi pilar pertumbuhan signifikan bagi Aceh Tengah. Dengan pesona alam yang memukau, termasuk pegunungan yang hijau dan danau yang menakjubkan, kota ini telah berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai penjuru. Peningkatan jumlah kunjungan setiap tahun menciptakan suasana yang dinamis dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal.

Dalam variabel Kunci Kelembagaan Penanggulangan kemiskinan: Adanya rencana strategis; Pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan; Adanya lembaga TKPKD; Jumlah instansi terkait; Pelaksanaan perda.

2. Kelemahan (W)

Pendapatan penduduk yang bekerja disektor pertanian adalah yang paling rendah. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian di Kabupaten Aceh kurang dari 1 Ha. Hal ini menyebabkan produktivitas petani turun yang berdampak pada rendahnya pendapatan petani, sehingga mengalami kesulitan didalam memenuhi kebutuhan dasar minimumnya atau masih dibawa garis kemiskinan pada identifikasi masalah Kemiskinan Multidimensi Bidang Kesehatan. Terdapat 5 indikator Bidang Kesehatan yang dilakukan analisis, yaitu : Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan (Morbiditas), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Stunting. Hasil identifikasi masalah Bidang Kesehatan terhadap 5 indikator tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator masih di bawah provinsi dan nasional. Identifikasi masalah Kemiskinan Multidimensi Bidang Infrastruktur Dasar. Terdapat 4 indikator Bidang Infrastruktur Dasar yang dilakukan analisis, yaitu: Persentase Rumah Tangga memiliki Akses Terhadap Sanitasi layak (%), Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%), Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau (%). Hasil identifikasi masalah Bidang infrastruktur Dasar terhadap 4 indikator tersebut menunjukkan jika secara posisi relatif dibandingkan dengan capaian provinsi dan Nasional, capaian keempat indicator masih dibawah target SPM terutama indikator Persentase Rumah layak huni. Jadi masalah dalam Bidang Infrastruktur Dasar adalah Persentase Rumah layak huni.

Untuk Priortas intervensi ketahanan pangan diarahkan pada kebijakan untuk mengendalikan harga beras. Identifikasi masalah Kemiskinan Multidimensi Bidang Pendidikan. Terdapat 8 indikator Bidang Pendidikan yang dilakukan analisis, yaitu : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI, Angka Partisipasi Murni SMP/MTS, Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Hasil identifikasi masalah Bidang Pendidikan terhadap 8 indikator tersebut menunjukkan jika secara posisi relatif dibandingkan dengan capaian Nasional, namun masih dibawah rata-rata provinsi. Analisis atau identifikasi masalah Kemiskinan Multidimensi Bidang Ketenagakerjaan. Terdapat 2 indikator Bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan analisis, yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hasil identifikasi masalah Bidang Ketenagakerjaan terhadap 2 indikator tersebut menunjukkan hal sebagai berikut: kedua indikator tersebut capaiannya lebih baik dari capaian Provinsi dan nasional. Meskipun capaian TPT sudah lebih baik, namun karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, maka dianggap perlu sebagai salah satu masalah. Identifikasi masalah kemiskinan berdasarkan 4 indikator kemiskinan konsumsi, yaitu: Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin, Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1),

dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Hasil identifikasi masalah kemiskinan konsumsi terhadap 4 indikator tersebut menunjukkan jika secara posisi relatif dibandingkan dengan capaian provinsi dan Nasional, capaian keempat indikator tersebut lebih jelek (Lebih tinggi dari Nasional). walaupun dari sisi jumlah penduduk miskin tidak menduduki peringkat pertama, provinsi aceh. dibandingkan dengan capaian Nasional, namun masih dibawah rata-rata provinsi.

3. Peluang (O)

- a. Dalam variabel kunci Lingkungan Mikro: Pertumbuhan ekonomi; Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ; Adanya TKPKD.
- b. Dalam variabel Kunci Lingkungan Makro: Rencana Strategis penanggulangan kemiskinan nasional; TKPK nasional; Lembaga Terkait TKPK; Koordinasi antar lembaga terkait TKPK; Pertumbuhan ekonomi; Pendapatan perkapita.

4. Ancaman (T)

Dari beberapa indikator lingkungan eksternal, faktor yang menjadi ancaman Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah adalah:

- a. Dalam variabel kunci Lingkungan Mikro: Perkembangan Investasi; Koordinasi antar lembaga TKPKD.
- b. Dalam variabel kunci Lingkungan Makro: Tingkat kemiskinan nasional; Kebijakan Fiskal.
- c. Dalam variabel kunci Lingkungan Internasional: Stabilitas nilai tukar.

Dari seluruh variabel yang menjadi ancaman dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah, lambatnya perkembangan investasi Kabupaten, koordinasi dalam TKPKD Kabupaten, tingkat kemiskinan provinsi dan nasional, kebijakan fiskal dan stabilitas nilai tukar. Sedangkan pengaruh indikator lainnya meskipun merupakan ancaman tetapi menunjukkan angka yang relatif kecil.

Alternatif strategi

Berdasarkan identifikasi lingkungan strategis di atas, beberapa alternatif untuk mendapatkan strategi dalam membangun kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut: Melalui pendekatan kombinatif dari alternatif-alternatif tersebut, Kabupaten Aceh Tengah dapat merancang strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk membangun kebijakan penanggulangan kemiskinan. Berikut merupakan tabel SWOT untuk mendapatkan strategi dalam membangun kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 1. Matriks Silang SWOT

PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
1. Pertumbuhan ekonomi; Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ; Adanya TKPKD, Rencana Strategis penanggulangan kemiskinan nasional;	2. Lambatnya perkembangan Investasi; Koordinasi antar lembaga TKPKD. Tingkat kemiskinan nasional dan provinsi; Kebijakan Fiskal.

	TKPK nasional; Lembaga Terkait TKPK; Koordinasi antar lembaga terkait TKPK; Pertumbuhan ekonomi; Pendapatan perkapita.		
KEKUATAN (S)	STRATEGI S-O	STRATEGI S-T	
3. Komoditi pertanian, kehutanan, dan perikanan, peningkatan wisatawan, Kelembagaan TKPKD, adanya instansi terkait TKPKD, perkembangan UKM	4. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar 5. Penguatan kelembagaan TKPKD 6. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar	7. Peningkatan daya saing investasi dan lapangan pekerjaan	
KELEMAHAN (W)	STRATEGI W-O	STRATEGI W-T	
8. Menurunnya produktivitas petani kopi, Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan (Morbiditas), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Stunting, Persentase Rumah Tanggamemiliki Akses Terhadap Sanitasi layak (%), Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%), Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau (%),Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI, Angka Partisipasi Murni SMP/MTS, Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	9. Pengembangan peraturan daerah sebagai payung hukum 10. Pengembangan Program perlindungan sosial 11. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar 12. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM	13. Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana yang inklusif	

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil fakta dan analisis yang telah dilakukan Aceh Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan maupun Program yang tertuang dalam rencana pembangunan dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan sudah cukup komprehensif.
2. Sebagian besar target capaian indikator makro Aceh Tengah telah tercapai adalah capaian PDRB ADHB maupun ADHK, PDRB per Kapita, laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan yang masih belum tercapai adalah angka kematian ibu, usia harapan hidup, dan angka partisipasi kasar sekolah menengah atas sederajat.
3. Kemudian diperlukan beberapa strategi penanggulangan kemiskinan di Aceh Tengah adalah sebagai berikut: Pengembangan peraturan daerah sebagai payung hukum penanggulangan kemiskinan; Pengembangan Program Perlindungan Sosial; Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKM; Penguatan kelembagaan TKPKD; Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar; Peningkatan daya saing investasi dan penciptaan lapangan kerja; dan Pengembangan pembangunan yang inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Chambers, Robert, 1997, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, LP3ES: Jakarta.
- Ginandjar, Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES: Jakarta
- Jordan, Bill. 1996. *A Theory of Poverty and Social Exclusion*. UK, Polity Press: Cambridge.
- Nazara, Suahasil. 2007. *Pengentasan Kemiskinan: Pilihan Kebijakan dan program yang Realistis*. Dalam *Warta Demografi* tahun ke 37. No. 4 Tahun 2007. Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Mubyarto, 1998, *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Aditya Media: Yogyakarta.
- Rangkuti, F. 2005. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suryahadi, A., Suryadarma, D., dan Sumarto, S. 2006. *Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Sectoral Components of Growth*. Working Paper. Jakarta.
- Sudaryanto, T. dan Rusastra, I.W. 2006. *Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan produksi dan Pengentasan Kemiskinan*. Dalam *Jurnal Litbang Pertanian* 25 (40) pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian: Bogor.